

OPTIMALISASI SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI ELEKTRONIK GOVERNMENT DI DESA MANGKUBUMI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Andi Sobandi¹, Ahmad Juliarso², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail : andisobandi890@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya sumber daya dalam implementasi elektronik government di desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. hal tersebut terlihat dari kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sumber daya dalam implementasi elektronik government di desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Optimalisasi Sumber Daya Dalam Implementasi Elektronik Government di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal dilihat dari kurangnya sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Sumber Daya, Elektronik Government.*

PENDAHULUAN

Tujuan negara sebagai pemberi layanan publik berbasis digital adalah untuk meningkatkan produktivitas, kemudahan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warganya. Dengan menggunakan teknologi digital, negara dapat memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Salah satu aspek utama dari tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa layanan publik menjadi lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Hal ini sangat penting bagi negara yang

hidup di era globalisasi yang membutuhkan pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berkualitas dan terpercaya (Risnawan, W., Henriyani, E., & Pramulya, D, 2024). Teknologi informasi membuat layanan publik lebih mudah diakses, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan.

Di era globalisasi saat ini, masyarakat memiliki akses ke informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat adanya kemajuan teknologi. Akses dan penyebaran informasi tentang layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah berkat kemajuan dalam teknologi informasi dan

komunikasi. Salah satu elemen utama dari kemudahan ini adalah ketersediaan informasi secara online. Dengan adanya situs web resmi pemerintah, portal layanan publik, dan aplikasi ponsel, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendapatkan data tentang berbagai layanan pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dll.

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berlaku, perangkat desa harus mempersiapkan diri untuk menyediakan layanan dan pembangunan di tingkat desa, baik dalam hal pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat berbasis e-government atau e-government, yang merupakan istilah untuk teknologi informasi pemerintahan. Pemerintah desa, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, harus mempersiapkan kemampuan perangkat desa untuk pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Kemajuan dalam infrastruktur, bidang sosial, ekonomi, dan budaya dapat menunjukkan kemandirian desa. Kemandirian desa dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Goodgovernance). Menurut UNDP (1997), tata kelola yang baik didefinisikan sebagai kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tentang

Desa, desa diberi wewenang yang signifikan berdasarkan asal-usul dan ukuran lokal. Pemerintah desa harus memiliki Sistem Informasi Desa untuk melaksanakan kewenangannya. Sistem ini harus memastikan bahwa masyarakat desa dapat mengawasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa (Pasal 82-86). Sistem informasi desa, yang dibangun dengan menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam mengelola basis data dan mendukung tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membangun sistem Jaringan Intra Pemerintah yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah, termasuk kelurahan, kecamatan, unit pelaksana teknis daerah lainnya, dan beberapa titik wifi publik. Tujuan dari pembentukan sistem tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. sesuai dengan prinsip-prinsip utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Desa Mangkubumi adalah salah satu desa di kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, tempat penelitian ini dilakukan, yang sudah menerapkan e-government sejak tahun 2022. Desa

Mangkubumi memiliki visi "Mangkubumi Terbaik" sebagai salah satu desa mandiri di Kabupaten Ciamis dan memiliki potensi menjadi desa digital dalam hal penggunaan teknologi digital.

Menurut pendapat dari Edward III (Syahrudin, 2020 : 58) terdapat empat isu pokok agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif yaitu ;Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Stuktur Birokrasi.

Sehubungan uraian diatas dan hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Implementasi Elektronik Government Di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
2. Kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang kerja

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Sumber Daya Dalam Implementasi Elektronik Government Di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui optimalisasi sumber daya dalam implementasi elektronik government di Desa Mangkubumi Kecamatan

Sadananya Kabupaten Ciamis. Menurut Sugiyono (2017 : 9) mengatakan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme atau enterpretif digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) orang informan yaitu kepala desa Mangkubumi, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan dan 3 orang kepala dusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi E-Government

Dalam menjalankan e-Government, sumber daya manusia (SDM) adalah komponen yang sangat penting. Mereka perlu memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup untuk mengelola dan menjalankan sistem digital. Untuk memastikan SDM tetap kompeten dan up-to-date dengan kemajuan teknologi, diperlukan

pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Selain keterampilan teknis, karyawan harus memahami kebijakan dan prosedur e-Government dan dapat berkolaborasi dengan baik dengan orang lain. Karena peralihan dari sistem manual ke digital sering menimbulkan resistensi di antara karyawan, manajemen perubahan sangat penting. Kesuksesan e-Government sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa kompetensi perangkat desa Mangkubumi dalam mengimplementasikan pelayanan digital belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya perangkat desa mangkubumi yang sudah lanjut usia hal tersebut mempengaruhi kompetensi perangkat desa dalam penggunaan teknologi, dan kekurangan sumber daya manusia muda dimana mereka lebih memilih merantau ke luar kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan menunjukkan bahwa perangkat desa tidak memiliki kemampuan yang optimal untuk menerapkan kebijakan e-government di Desa Mangkubumi. Sebagian besar perangkat desa saat ini sudah lanjut usia, jadi sulit untuk memahami dan menerapkan kebijakan dan teknologi e-government. Desa ini juga mengalami

kekurangan tenaga kerja usia muda yang lebih mampu menggunakan teknologi baru. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan e-government terhambat dan tidak efektif. Dan kurangnya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk perangkat desa.

Analisis hasil dari pembahasan tersebut menunjukkan beberapa masalah penting yang menghambat pelaksanaan e-government. Pertama, faktor usia lanjut sering dikaitkan dengan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan perubahan kebijakan, yang mengurangi efisiensi penggunaan e-government. Kedua, kekurangan tenaga kerja yang lebih muda yang mahir dalam teknologi. Banyak pemuda desa merantau ke luar kota untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik. Ketiga, perangkat desa kekurangan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang memadai, perangkat desa tidak dapat memahami kebijakan e-government dan menggunakan teknologi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya manusia yang kompeten dalam Implementasi Elektronik Government Di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Hal ini karena adanya hambatan yang ditemui.

Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya tenaga kerja yang kompeten dibidang teknologi dan kurangnya tenaga kerja usia muda sehingga

perangkat desa didominasi oleh individu yang sudah lanjut usia. Kondisi ini menimbulkan beberapa kendala, seperti rendahnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru, lambatnya proses pembelajaran, dan resistensi terhadap perubahan sistem. Selain itu, keterbatasan tenaga muda juga berpengaruh pada inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan layanan digital yang lebih efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-Government di Desa Mangkubumi, perlu dilakukan beberapa tindakan strategis. Pertama, memperoleh tenaga kerja muda yang mahir dalam teknologi informasi untuk meningkatkan tim perangkat desa. Kedua, perangkat desa yang lanjut usia harus dilatih dan memahami teknologi baru dengan lebih baik. Ketiga, bekerja sama dengan universitas atau lembaga pendidikan untuk memberikan magang TIK kepada mahasiswa. Keempat, menggunakan pendekatan mentor-mentee di mana tenaga kerja muda membantu perangkat desa yang lebih tua. Terakhir, membuat program yang akan mendorong perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan teknologi mereka.

Hal ini belum sesuai dengan pendapat Menurut Van Metter & Van Horn (Agustino (2019 : 134) salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah sumber daya, yang mengemukakan bahwa:Keberhasilan proses

implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang paling terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan dalam peoses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah diterapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil,maka kinerja kebijakan punlik sangat sulit untuk diharapkan.

Dengan demikian Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa indikator sumber daya manusia yang kompeten yang merupakan sumber daya utama dalam implementasi elektronik government belum optimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kurangnya kompetensi perangkat desa dalam menggunakan teknologi karena perangkat desa didominasi oleh perangkat desa yang sudah lanjut usia, dan kurangnya tenaga kerja usia muda. Serta kurangnya pelatihan dan pengembangan perangkat desa.

2. Fasilitas-Fasilitas Penunjang Dalam Implementasi Elektronik Government

Fasilitas pendukung sangat penting untuk menerapkan e-Government. Pertama, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk jaringan internet yang cepat dan stabil serta perangkat keras seperti

komputer dan server yang handal. Kedua, perangkat lunak yang tepat untuk mendukung berbagai tugas pemerintahan, seperti sistem manajemen data, aplikasi layanan publik online, dan platform komunikasi internal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas pendukung Desa Mangkubumi tidak optimal untuk menjalankan pelayanan digital. Tidak adanya fasilitas penunjang kerja yang memadai adalah salah satu masalah utamanya, yang berdampak langsung pada seberapa efektif dan efisien penerapan e-government. Fasilitas yang tersedia sudah tidak berfungsi dengan baik; contohnya adalah laptop yang rusak dan harus diganti. Kondisi ini sangat mengganggu operasi sehari-hari dan kemampuan perangkat desa untuk menyediakan layanan digital dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator Fasilitas diketahui 4 informan menyatakan bahwa untuk fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan digital belum terpenuhi dan 2 informan lainnya menyatakan sudah terpenuhi. Kurangnya fasilitas ini dapat menghambat kelancaran dan efektivitas layanan digital, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepuasan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pelayanan digital yang optimal, memastikan semua

pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan layanan dengan baik.

Analisis dari hasil pemaparan tersebut bahwa fasilitas-fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan elektronik government sangat penting untuk menunjang keberlangsungan kebijakan yang diterapkan. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan dengan efektif. Fasilitas fisik mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, peralatan, teknologi, dan sumber daya material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Ketidadaan atau kekurangan fasilitas pendukung dapat menyebabkan hambatan operasional, mengurangi efisiensi, dan menurunkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator fasilitas-fasilitas penunjang kerja dalam implementasi elektronik government diketahui bahwa fasilitas-fasilitas pendukung belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang ditemui dilapangan.

Hambatan yang ditemui yaitu Perangkat yang tersedia sudah tidak layak dipakai dan perlu diganti atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional, mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan e-government. Koneksi internet yang tersedia juga belum mendukung kebutuhan operasional secara optimal, dengan kecepatan dan stabilitas yang masih di bawah standar. Kurangnya fasilitas ini sangat mempengaruhi efisiensi dan

efektivitas implementasi e-government tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu Serangkaian langkah strategis yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi kendala yang menghalangi pelaksanaan e-Government di Desa Mangkubumi. Pertama, perangkat baru harus segera dibeli untuk menggantikan perangkat lama yang tidak berguna. Perangkat baru harus memenuhi kebutuhan operasional agar aplikasi dan sistem e-Government dapat beroperasi dengan baik. Pengadaan ini harus dilakukan melalui proses yang transparan dan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, peningkatan kualitas koneksi internet sangat penting, dan perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan kecepatan dan stabilitas jaringan yang memadai. Untuk meningkatkan kualitas koneksi internet, perlu dipertimbangkan untuk melakukan investasi dalam infrastruktur jaringan, seperti pemasangan kabel serat optik atau teknologi jaringan nirkabel yang lebih canggih.

Dari uraian diatas belum sesuai dengan pendapat dari Menurut pendapat Agustino (2012 ; 151) yang mengemukakan bahwa ;Fasilitas-fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dengan demikian Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa fasilitas-fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan elektronik government belum berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak fasilitas seperti komputer yang memerlukan upgrade dan perbaikan secara berkala dan kurangnya koneksi internet. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan dengan efektif. Fasilitas fisik mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, peralatan, teknologi, dan sumber daya material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Ketiadaan atau kekurangan fasilitas pendukung dapat menyebabkan hambatan operasional, mengurangi efisiensi, dan menurunkan kualitas pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa optimalisasi sumber daya dalam implementasi elektronik government di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum optimal. Masih terdapat indikator yang belum dilaksanakan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal.

Adapun hambatan yang ditemui yaitu kurangnya kompetensi dari perangkat desa dan kurangnya fasilitas penunjang dalam bekerja, sehingga dari hambatan tersebut menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya memperoleh tenaga kerja muda yang mahir dalam teknologi informasi untuk meningkatkan tim perangkat desa. Perangkat desa yang lanjut usia

sebaiknya dilatih dan memahami teknologi baru dengan lebih baik, menambah dana anggaran untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan, dan melakukan upgrade atau pembaruan terhadap fasilitas yang sudah rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: alfabeta.*
- Risnawan, W., Henriyani, E., & Pramulya, D. (2024). Collaborative Governance Dalam Promosi Destinasi Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis. *Jkdb: Jurnal Konservasi dan Budaya, 1*(1), 14-28.
- Sugiyono, (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syahrudin, (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus.* Nusamedia.
- Tjilen, (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung.* Nusamedia.
- Trisantosa, Dewi Kurniasih & Hubeis, (2022). *'Pelayanan Publik Berbasis Digital.* Deepublish.
- Wahab,(2001). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.* Bumi Aksara.
- Yudis, (2019). *Pemimpin Dan Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: Alqaprint Jatinagor.